

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transisi demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini, membangkitkan tuntutan yang lebih luas atas peningkatan kehidupan politik bagi setiap warga negaranya. Tuntutan-tuntuan itu menginginkan adanya sebuah perubahan demi terwujudnya negara demokrasi seperti yang diinginkan. Dengan sebuah sistem Reformasi yang menjadi slogan, sebagai pengganti sistem Orde Baru. Sistem ini dimaknai sebagai proses penjungkirbalikkan nilai-nilai lama dan munculnya nilai-nilai baru. Kemudian menguatnya aspirasi demokratisasi, reformasi disegala bidang, keterbukaan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebagian dari nilai-nilai baru tersebut.

Berkembangnya nilai-nilai demokrasi ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi Partai Golkar, sebab merupakan fakta bahwa Golkar dalam sejarahnya merupakan bagian penting dari kekuasaan hegemonik Orde Baru yang otoriter dan antidemokrasi. Kekuatan Golkar waktu itu dibantu oleh ABRI dan Birokrasi sehingga akronim ini sering dikenal dengan istilah ABG (Abri, Birokrasi dan Golkar), sebagai kekuatan penuh penopang pelegitimasi kekuasaan dibawah Presiden Soeharto.

Berhentinya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari tampuk kekuasaannya menjadikan Golkar (*sebelum menjadi Partai*) seakan kehilangan pegangan haluan politiknya. Dalam beberapa saat lamanya, masyarakat sempat

bertanya-tanya tentang keberadaan Golkar. Bahkan berbagai kesalahan dan tuduhan mulai di timpakan ke Partai Golkar, yakni dianggap sebagai penyebab utama krisis. Sedangkan internal Golkar sendiri terjadi keretakan, dan organisasi ini seakan berada di pinggir jurang kehancuran. Sejumlah pengamat, politikus, dan ilmuwan ketika itu membuat prediksi bahwa Golkar tidak akan mampu bertahan hidup dan akan segera menyusul runtuhnya kekuasaan dengan rezim Orde Baru-nya.

Pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan Munaslub, yang mengagendakan Pemilihan Ketua Umum secara Demokratis. Berdasarkan hasil-hasil keputusan Munaslub, Golkar berubah menjadi Partai Golkar dengan Paradigma Baru; merombak struktur kepengurusan dan perubahan mekanisme pengambil keputusan; memutus jalur-jalur politik yang menopangnya (Jalur A dan B); serta mengondisikan pelaksanaan musda-musda DPD Golkar di seluruh Indonesia. Dengan melakukan langkah-langkah strategis tersebut, Partai Golkar berupaya menciptakan kesisteman baru yang adaptif terhadap perubahan. Adapun Paradigma Baru yang pertama kali di lontarkan oleh Akbar tandjung itu pada intinya adalah mengharapkan Golkar dibangun dengan nilai-nilai baru selaras dengan tuntutan reformasi, dan menjadikan dirinya sebagai Partai politik yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid mengakar dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten. Selanjutnya mengenai perombakan struktur organisasi Golkar diawali dengan menghapus Dewan Pembina karena sejak Munas Golkar 1978 telah menjadi

institusi Internal yang sangat berkuasa. Setelah itu langkah politik lainnya ialah pemutusan jalur-jalur pendukung Golkar: (A)Abri,(B) birokrasi,(G) Golkar seperti diatas. Ketika terjadi perubahan politik di Indonesia, dan desakan agar militer dan birokrasi netral dari politik, Golkar segera menangkap fenomena tersebut dengan mempersiapkan langkah-langkah politik berkenaan dengan pemutusan hubungan dengan dua jalur pendukungnya tersebut. Dengan putusnya hubungan pendukung jalur A dan B tersebut, Partai Golkar dituntut untuk menjadi partai politik yang mandiri dan tidak eksklusif. Partai ini harus berjuang menyusun kepengurusannya dari tingkat Pusat hingga tingkat terbawah dalam struktur kepengurusan partainya, tanpa melibatkan PNS dan anggota TNI/POLRI yang masih aktif. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Partai Golkar, mengingat sebagian besar pengurusnya berasal dari unsur PNS yang masih aktif, khususnya di daerah-daerah. Namun karena telah menjadi keputusan politik yang tidak dapat ditolak lagi, Partai Golkar harus menerima kenyataan tersebut.¹

Pada tahun 1999, di tengah-tengah tekanan politik yang keras, Golkar ternyata berhasil lolos sebagai peserta Pemilu, Partai Golkar yang diyakini akan kehilangan banyak pendukungnya tersebut ternyata mampu membalikkan anggapan yang berkembang dalam masyarakat dengan meraih dukungan suara terbesar kedua pada pemilu 1999, setelah PDIP. Partai Golkar dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut berhasil meraih suara 23.741.749 (22,4%) dan memperoleh 120 kursi di DPR. Kemudian pada pemilu ke dua era reformasi 2004, Partai Golkar justru meraih dukungan suara terbesar dari para pemilih. Partai ini

¹Akbar Tandjung, *THE GOLKAR WAY: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: Gramedia, 2007, hal 97-103.

berhasil memperoleh suara terbanyak, yakni 24.461.104 (21,58%) atau 128 kursi di DPR.²

Pada tahun 2009 Partai Golkar melangsungkan Munas VIII (2009-2014) di Pekanbaru, Riau. Pada Munas itu terpilih Abu Rizal Bakri (Ical) sebagai Ketua Umum Periode 2009-2014 dengan dukungan 269 suara, pesaing terdekatnya ialah Surya Paloh dengan perolehan dukungan 240 Suara, sementara Dua kandidat lain Tommy Soeharto dan Yudi Chrisnandi praktis tidak memperoleh suara.³

Kemudian Pada tahun 2009 itu pula nampaknya menjadi arena politik yang kurang menguntungkan bagi parpol yang pernah berkuasa di Parlemen seperti halnya PDI-P, GOLKAR, PAN, PPP yang secara umum mengalami penurunan dalam perolehan suara, yang menandakan bahwa partai-partai politik lama harus bersaing dengan partai-partai politik baru yang telah mendapat simpati di hati rakyat, yang dibuktikan dalam perolehan suara dalam pemilu legislatif. Pada Pemilu itu Partai Demokrat sebagai pemenangnya, perolehan suaranya sebagai berikut: Partai Demokrat (26,48%) dengan perolehan kursi parlemen 148, Partai Golkar (18,92%) jumlah kursi 106, PDI Perjuangan (16,78%) jumlah kursi 94.⁴

Adapun pada tahun 2014 PDI-P kembali mengulangi sejarahnya sebagai Partai pemenang. Berikut persentase perolehan suara pada pemilu 2014:

²*Ibid.* hal 9-12.

³Website:http://www.indosiar.com/fokus/aburizal-bakrie-terpilih-menjadi-ketua-umum_82498.html, diakses tanggal 28-10-2015. Jam: 14.47 Wib.

⁴Website: <http://www.rumahpemilu.org/in/read/747/Hasil-Perolehan-Suara-Peserta-Pemilu-DPR-Tahun-2009.>, dan data diolah, diakses tanggal 28-10-2015. Jam: 13.31 wib

PDIPerjuangan 23.681.471 (18,95%), Partai Golkar 18.432.312 (14,75%), Partai Gerindra 14.760.371 (11,81%), Partai Demokrat 12.728.913 (10,19%).⁵

Bisa kita lihat degradasi persentase perolehan suara partai Golkar pada pemilu 2014, semakin jauh dari perolehan-perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Di Eramulti partai saat ini, lawan-lawan daripada Partai Golkar sebagian ialah partai-partai politik yang para pendirinya pernah menjadi kader Golkar, seperti halnya Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo, partai Hanura dipimpin oleh Wiranto, terakhir ini ialah partai Nasdem dinahkodai oleh Surya Paloh dst. Mereka adalah kader-kader Golkar, dengan berbagai macam masalah akhirnya keluar dari partai dan membentuk partai baru.

Kemudian fenomena menurunnya persentase suara Partai pada pemilu diatas, cukup membuktikan bahwa lemahnya kaderisasi yang dilakukan partai politik sehingga tidak mampu mendongkrak perolehan suara pada pemilihan umum, padahal salah satu fungsi partai ialah kaderisasinya. Selain kaderisasi, penyebab penurunan suara partai ialah ketokohan yang dimiliki oleh partai, seperti dijelaskan diatas bahwa banyak tokoh-tokoh Golkar yang keluar dari partai dan mendirikan partai baru, dan ini cukup membuat suara-suara partai yang tadi nya bulat menjadi pecah dan harus berbagi dengan partai baru yang lahir dari rahim Golkar. kemudian hal lainnya ialah perpecahan dalam internal partai yang berlarut-larut hal ini berdampak pada tidak terlaksananya program kerja partai.

Dari pembahasan ini, cukup membuktikan bahwa pentingnya kaderisasi yang matang dalam partai politik, sehingga terbangun loyalitas yang tinggi

⁵Website:<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014.>, dan data diolah, diakses tanggal 28-10-2015. Jam: 13.44 wib.

terhadap partainya. karena kader dalam hal ini ia sebagai tulang punggung penggerak roda partai. Selanjutnya kaderisasi dalam partai politik yang dimaksud, ia mampu menghasilkan kualitas-kualitas kader yang memiliki kemampuan membawa nilai-nilai perjuangan yang berkesinambungan yang mengembangkan komitmen yang jelas dan terarah terhadap personal partai politik mengenai visi, misi perjuangan parpol yang pada akhirnya menciptakan ikatan emosional yang integrated serta memiliki rasa nasionalisme dengan mengedepankan nilai-nilai kepentingan nasional.

Kaderisasi dipengaruhi oleh tradisi partai dan lingkungan sistem politiknya. tidak semua partai menjadikan keanggotaan sebagai satu-satunya jalan masuk menuju jenjang karier politik yang terhormat, bahwa setiap partai politik (parpol) terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutment atau penyeleksian yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dimana kaderisasi adalah suatu proses membentuk dan mempersiapkan tenaga-tenaga potensial, militan, terdidik, terlatih untuk mengarahkan dan menggerakkan berbagai kekuatan atau sumber daya serta mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas pencapaian misi organisasi secara optimal dimanapun berada dengan penuh dedikasi, semangat dan tanggap terhadap situasi yang ada.

Dalam konteks perkaderan, Partai Golkar mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk mendapatkan kader yang tangguh maka diperlukan suatu pembinaan yang secara khusus dengan cara bertahap. Adapun pentahapan tersebut yaitu dengan membangun kekuatan pribadi, sebab pribadi yang baik dapat melahirkan keluarga yang baik, keluarga yang baik dapat pula melahirkan masyarakat baik.

Mengingat pembangunan sebuah negara memerlukan pribadi dan masyarakat yang shalih, yang layak memikul amanah yang dibebankan kepadanya, maka individu bertanggung jawab karena ia adalah alat masyarakat dan negara yang terpenting dalam melaksanakan tugas sosial dan politik demi kepentingan dan tujuan bersama.

Dalam Partai Golkar, kaderisasi menjadi aktivitas utama partai, untuk itu Partai Golkar juga sering disebut partai kader, tentunya tidak begitu menekankan pada jumlah massa yang besar tetapi lebih menekankan pada disiplin anggota-anggotanya dan ketaatan dalam organisasi. Sehingga kekuatan partai kader sesungguhnya bersumber bukan dari kuantitas melainkan kualitas anggotanya. Sebagai partai yang besar dan sudah teruji dalam sistem politik Indonesia, maka seharusnya partai Golkar menjadi barometer atau percontohan bagi partai-partai baru terutama dalam hal proses kaderisasi nya.

Kemudian dipilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sub penelitiannya, selain kota ini dikenal dengan kota budaya, kota pendidikan, kota wisata dll, kota ini juga dianggap sebagai salah satu basis Partai Golkar, walaupun Sri Sultan HB X tidak lagi menjadi anggota partai ini. Adapun hal lainnya, dalam perolehan suara berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU DIY, untuk DPR RI, PDI Perjuangan mendapatkan suara terbanyak, setelah itu disusul oleh PAN, Gerindra, Golkar dan seterusnya.⁶ Walaupun hasil rekapitulasi KPU DIY itu menempatkan partai Golkar pada urutan keempat namun Golkar tidak gembos dalam perolehan kursi di DPRD Provinsi. Golkar cukup berhasil mengantarkan 8 kader nya menduduki

⁶Website: <http://www.antaraneews.com/berita/431082/pdip-pimpin-perolehan-suara-di-diy>, diakses tanggal 21-01-2016, jam 11:03 wib.

kantor DPRD Provinsi DIY, yang mengimbangi kursi PAN yang juga memiliki 8 kursi. Dan kursi terbanyak diperoleh oleh PDIP 14, sementara parta lainnya Gerindra 7 kursi, PKS 6 kursi, PKB 5 kursi, kemudian Partai Demokrat dan PPP masing-masing 2 kursi, terakhir ialah Parati Nasedem 3 kursi dari 55 kursi di DPRD Provinsi.⁷

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang sistem perkaderan yang dilakukan Partai Golongan Karya. Selanjutnya, Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2014, untuk itu penyusun mengambil judul ***“Analisis Sistem Perkaderan Partai Golkar”***

⁷Website:http://www.rri.co.id/yogyakarta/post/berita/79117/pemilu_2014/perolehan_kursi_dprd_diy.htmldiolah dan diakses tanggal 21-01-2016, jam 11:21 wib.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

“ Bagaimanakah Sistem Perkaderanyang dilakukan oleh Partai Golongan Karya di Dewan Pimpinan Daerah D.I.Yogyakarta tahun 2011-2014?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan secara objektif proses kaderisasi yang dilakukan Partai Golongan Karya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang sistem kaderisasi dalam tubuh Partai Golkar.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum partai politik merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam sistem tersebut. Dipergunakan untuk mempermudah penyaluran partisipasi masyarakat dalam hak politiknya.

Adapun beberapa ilmuwan mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

1. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil disertai materiil.

2. Sigmund Neuman

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

3. Giovanni Sartori

Partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

4. Miriam Budiardjo

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orienasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstiruisional untuk melaksanakan programnya.⁸

b. Fungsi Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Berikut ini sejumlah fungsi partai politik:

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

3. Partisipasi Politik

⁸ Prof. Miriam Budiarto, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, edisi revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 404.

Partisipasi politik ialah kegiatan yang warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

4. Komunikasi Politik

Komunikasi Politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

5. Pengendali Konflik

Mengendalikan konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

6. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.⁹

c. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian Menurut Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties*, dan demikian juga G. A. Jacobsen dan M.H. Lipman dalam buku

⁹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu politik*, Jakarta: PT.Grasindo, 1992, Hal 116-121.

Political Science tentang sistem partai, mengklasifikasikan sistem kepartaian dalam tiga macam sistem, yakni:

1. Sistem Partai - Tunggal (*One Party System*)

Biasanya diakui bahwa di negara-negara dengan sistem partai tunggal, partai kenyataannya merupakan alat pemerintah daripada perhimpunan suka rela dari para pemilih. Sistem partai tunggal meliputi Negara yang benar-benar hanya mempunyai satu partai disamping itu juga Negara dimana ada satu partai yang dominan. Dalam negara yang menganut sistem partai tunggal, keadaan kepartaian dalam Negara tersebut tidak bersaing atau Non kompetitif, hal ini disebabkan karena partai-partai yang ada dalam negara harus menerima pimpinan dari partai yang dominan serta tidak dibenarkan untuk bersaing secara bebas terbuka.

2. Sistem Dwi-Partai (*Two Parti System*)

Didalam negara yang menganut sistem dua partai atau lebih maka yang memegang peranan dominan hanya dua partai saja. Dalam sistem dua partai maka dapat dibagi menjadi dua partai, yaitu partai besar yang berkuasa, karena dapat menang dalam pemilihan umum dinamakan partai mayoritas (*majority party*), partai ini memegang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum. Sedangkan partai yang lainnya dinamakan minoritas (*minority party*) atau partai oposisi (*oposisi party*) karena kalah dalam pemilihan umum. Partai oposisi mempunyai tugas memeriksa dengan teliti dan mengkritik pemerintah.

3. Sistem Multi Partai (*Multi party System*)

Dalam Negara yang menganut sistem multi partai membuat iklim demokratisasi kembali menyeruak. Hal ini dikarenakan sistem multi partai dapat merepresentasikan wakil-wakil yang diinginkan oleh masyarakat. Efek yang muncul dari sistem ini adalah terdapatnya beberapa partai yang sama imbang kekuatannya. Dan masing-masing mempertahankan visinya dalam mengatasi sejumlah persoalan tertentu yang dianggap dapat meraih simpati masyarakat.¹⁰

d. Tipologi Partai Politik

Dalam konsep masyarakat dewasa ini mengenai partai politik ialah sebuah organisasi yang hanya bertujuan meraih kekuasaan, dan bercengkrama tegur sapa dengan masyarakat hanya menjelang pemilu, setelah itu menghilang. Hal ini mungkin dikarenakan praktek yang dirasakan masyarakat dalam setiap momen pemilihan umum dan sesuai apa yang mereka lihat dan rasakan.

Secara teoritik dapat dipahami bahwa setiap partai politik memiliki tipologi masing-masing berdasarkan beberapa hal. Ramlan Surbakti mendefinisikan tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orienasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Dibawah ini diuraikan sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria-kriteri tersebut, sebagai berikut:

¹⁰Maurice Duverger, G. A. Jacobson dan M. H. Lipman, dalam Sulistiati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Gala Indonesia, 1984, Hal 114-115

1. Azas dan Orientasi

Berdasarkan azas dan orientasinya, partai politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Adapun ketiga tipe ini meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. *Pertama*, yang dimaksud Partai politik pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini terorganisir agak longgar. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh partai pragmatis. *Kedua*, yang dimaksud dengan partai doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkrit dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkret dan partai ini terorganisasikan secara ketat. Partai komunis dimana saja merupakan contoh partai doktriner. *Ketiga*, yang dimaksud dengan partai kepentingan ialah suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

partai ini sering di temui dalam sistem banyak partai tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai berkompetisi namun tak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat. Misalnya, Partai Hijau di Jerman, Partai Buruh di Australia, dan Partai Petani di Swiss.

2. Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massasebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dengan mudah dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lingkungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum. Partai kader adalah suatu partai politik yang mengandalkan kualitas anggotanya, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya

yang demikian partai kader acap kali disebut partai yang sangat elitis. Contoh partai kader ini terdapat pada Nazi di Jerman dan Partai Komunis dimanapun.

3. Basis Sosial dan Tujuan

Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

- a. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
- b. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha;
- c. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu;
- d. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi tiga. *Pertama*, partai perwakilan kelompok. Artinya, partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen seperti Barisan Nasional di Malaysia. *Kedua*, partai pembinaan bangsa. Artinya, yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura. *Ketiga*, partai mobilisasi. Artinya, partai yang berusaha memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan

partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopilistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat. Partai Komunis di negara-negara komunis merupakan contoh partai mobilisasi.¹¹

e. Tugas partai politik

Dalam negara yang berpaham demokrasi, di mana masyarakatnya merupakan masyarakat heterogen, partai politik mempunyai beberapa tugas, di antaranya yaitu :

1. Tugas pokok partai politik yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
2. partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan atau ide-ide tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah.
3. partai politik mempunyai tugas mendidik para warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebafei mahluk sosial.
4. partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.

¹¹Lihat Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, Hal 120-124

5. partai politik bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.¹²

f. Klasifikasi Partai Politik berdasarkan jenis

Menurut Ichlasul Amal, klasifikasi partai politik berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan ada 5 jenis partai politiknya, yakni: (1) Partai Proto, (2) Partai Kader, (3) Partai Massa, (4) Partai Diktatorial, dan (5) Partai Catch-all.

1. Partai *Proto*

Adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol partai proto adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non anggota atau “outs”. Selebihnya, partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai proto adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat.

2. Partai *Kader*

Merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat tergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih,

¹²Sulistiati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1987, hal 113-114

keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah Konservatisme ekstrim atau maksimal Reformisme moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Contoh: PSI di Indonesia (1950-1960).

3. Partai *Massa*

Muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Jadi, latar belakang munculnya partai massa amat bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai kader. Partai proto dan partai kader terbentuk didalam Parlemen (intra-parlemen), memiliki basis pendukung kelas menengah keatas, serta memiliki tingkat organisasional dan ideologis yang relatif rendah. Sebaliknya, partai massa dibentuk di luar lingkungan Parlemen (ekstra-parlemen), berorientasi pada basis pendukung yang luas misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Contoh Contoh : Partai Politik di Indonesia (1950-1960-an), seperti PNI, Masyumi, PKI, dan lain-lain.

4. Partai *Diktatorial*

Merupakan sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai ini melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota-anggota partai. Rekrutmen keanggotaan partai diktatorial dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa. Untuk diterima sebagai anggota partai ini seseorang harus lebih dahulu diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai. Partai diktatorial menuntut pengabdian secara total setiap anggotanya. Contoh : PKI dan umumnya partai-partai komunis.

5. Partai *Catch-all*

Merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah *Catch-all* pertama kali dikemukakan oleh Otto Kircheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik paartai-partai di Eropa Barat pada masa pasca Perang Dunia Kedua. *Catch-all* dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya.” Tujuan utama partai ini adlah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Contoh: Golkar di Indonesia (1971-1998)

Partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan (*Interest group*) dan kelompok penekan (*Pressure group*). Partai dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik,

sementara kelompok kepentingan dan kelompok penekan lebih memilih cara persuasi, lobi, dan propaganda dalam usaha mempengaruhi pemerintah.¹³

g. karakteristik Partai Politik

Maurice Duverger didalam bukunya *Political Party*, mengatakan bahwa perbedaan karakteristik partai-partai politik guna memahami konsep partai politik itu sendiri, biasa dikatakan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik. Untuk dapat memahami karakteristik partai-partai politik biasa dilakukan dengan meninjau dari segi organisasi, keanggotaan ataupun aspek kepemimpinannya. Dengan ini M. Duverger mencoba mengklasifikasikan partai-partai politik berdasarkan *direct structured* dan *indirect structure*.

1. *Direct Structure*: Keanggotaan seseorang dalam partai politik dilihat sebagai individu-individu yang secara langsung masuk dan mengikuti diri dalam partai politik tertentu.
2. *Indirect Structure*: dalam organisasi yang terikat kepada suatu partai politik tertetnu, karena adanya kepentingan timbal balik.¹⁴

2. Rekruiemen Politik

Sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruiment*), yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan

¹³Dr. Ichlasul amal (ed), *TEORI-TEORI MUTAKHIR PARTAI POLITIK*, Yogya: PT. Tiara Wacana, 1988, hal. XI-XIV

¹⁴Maurice Duverger, dalam Heppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hal 193.

menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calonpimpinan partai atau pimpinan bangsa.¹⁵ yang kemudian dapat kita lihat dan rasakan dampaknya ketika para kader partai tersebut menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif.

a. Kaderisasi

Kemampuan sebuah partai untuk melakukan “pengemblengan” atau pematangan terhadap SDM-nya sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif dibidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Hal ini dapat dilakukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan secara simultan dan terencana pada semua tingkatan kepengurusan partai.

b. Sistem Pengkaderan

Sistem pengkaderan merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas dan memiliki pedoman-pedoman pokok. Dari penerapan sistem pengkaderan ini secara umum mengharapkan hasil yang cukup maksimal sehingga partai politik memiliki generasi penerus.

1. Bentuk dan Jenjang Perkaderan

Perkaderan didefinisikan oleh Ivancevich (1995) adalah sebagai “usaha meningkatkan kinerja kader dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. Beliau

¹⁵ Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, hal 23.

mengemukakan sejumlah butir penting tentang perkaderan yang dapat kita lihat dibawah ini :

a. Perkaderan (*Training*)

Adalah sebuah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja aparat organisasi. Perkaderan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. perkaderan berorientasi ke masa sekarang dan membantu kader untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetisi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

b. Belajar (*Learning*)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kader dalam usaha menguasai ketrampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu yang mengakibatkan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku kinerja mereka.

c. Ketrampilan (*Skill*)

Adalah setiap perilaku kerja yang telah dipelajari. Oleh karena itu, yang harus dicapai dalam perkaderan adalah peningkatan keterampilan yang diperlukan . keterampilan yang biasanya menjadi prioritas utama perkaderan adalah ketrampilan yang bersifat motorik (menggunakan organ tubuh terutama tangan), kognitif (kemampuan yang menggunakan daya nalar atau analisis), dan verbal (menggunakan mulut atau

berkomunikasi) yang juga disebut ketrampilan “interpersonal”.¹⁶

2. Prinsip Dasar bagi Pengkaderan

Kaderisasi di organisasi manapun merupakan urat nadi bagi sebuah organisasi. Kaderisasi adalah proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting :

Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan.

Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda.¹⁷

Ini merupakan bentuk pendidikan politik, dimana selama ini peran tersebut terabaikan. Kemampuan sebuah partai untuk melakukan *pengemblengan* atau pematangan terhadap SDM-nya sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif dibidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Hal ini dilkaukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan secara simultan dan terencana pada semua tingkatan kepengurusan partai.

¹⁶ Dr. H. Achmad S. Ruky, *Sumber Daya Manusia Berkualitas: Mengubah Visi Menjadi Realitas*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal 230-231.

¹⁷ Czudnowski dalam Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal 113-114

Kemudian Czudnowski mengemukakan terkait rekrutmen politik. Ia mengemukakan beberapa hal yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif :

- a. *Social Background*, artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seorang calon elit dibesarkan.
- b. *Political Socialization*, dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan demikian, orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan punya kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut sehingga dia dapat mempersiapkannya dengan baik.
- c. *Initial Political Activity*, dimana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.
- d. *Apprenticeship*, dimana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational variables*, dimana disini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja (sesuai dengan ajaran demokrasi), namun dinilai pula faktor kapasitas

intelektual, percaya diri, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.

f. Motivations, dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.¹⁸

3. Metode Perkaderan

Menurut Prof. Koentjoroningrat metode (*methodis*) adalah suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja yaitu memahami objek yang menjadi sasaran.¹⁹ Jadi metode perkaderan adalah suatu metode yang digunakan dalam pelaksanaan perkaderan.

Menurut Drs. Moekijat bahwa metode perkaderan itu banyak sekali jumlahnya dan tidak satupun metode yang paling baik bila dibandingkan dengan metode yang lain.²⁰ Oleh karena itu metode-metode yang digunakan dalam suatu perkaderan disesuaikan dengan jenis perkaderan yang akan diberikan kepada perorangan atau kelompok. Menurut Drs. Manullang metode perkaderan dapat dibagi menjadi tiga model yakni:

a. Metode Kuliah

Metode kuliah adalah proses penyampaian informasi dan pengetahuan dari perkaderan kepada peserta perkaderan dalam waktu yang relatif

¹⁸ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004*Ibid*, hal 101-102

¹⁹ Prof. Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983.

²⁰ Moekijat, *Evaluasi Latihan Bagi Pegawai*, Bandung: Sinar Harapan, 1992.

singkat. Metode ini dapat sangat efektif, kurang efektif maupun dapat juga membosankan peserta. Hal ini tergantung dari sumber daya manusia yang menjadi tainer.

b. *Case Method* dan *Incident Method*

Case Method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu kasus untuk dipecahkan dan dianalisis. Kasus yang digunakan untuk merangsang topik-topik diskusi dan dari semua jenis seperti simulasi, kasus sederhana, ataupun kompleks.

Incident Method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu kasus dalam bentuk laporan tertulis yang pendek, kemudian keterangan selanjutnya dicari oleh peserta sendiri dengan mengajukan pertanyaan kepada pelatih atau seseorang yang telah ditentukan untuk memberikan informasi. Kemudian peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil keputusan.

Perbedaan antara *Case Method* dan *Incident Method* adalah dalam *Case Method* peserta diberikan gambaran masalah 80%, sedangkan pada *Incident Method* peserta hanya diberikan gambaran masalah 25% saja. Selebihnya dicari sendiri oleh peserta. Sedangkan kelemahan keduanya adalah:

1. Pemakaian kasus lama kurang baik, karena keadaan terjadinya kasus tersebut telah berbeda pada saat kasus tersebut diberikan dalam pelatihan.
2. Tidak segera dapat mengetahui efektivitas dari metode tersebut.

c. *Simulation Method*

Simulation method adalah metode di mana para peserta pelatihan lebih memainkan peranan dalam suatu organisasi. Sebagian peserta menjadi pengamat dari peran yang dimainkan oleh peserta yang lain. Adapun jenis simulasi terdiri dari tiga model yakni:

1. *Management Game*

Yaitu peserta diminta peran sebagai manajer dari suatu organisasi tiruan dan kemudian berdasarkan data yang telah disiapkan, kemudian peserta diminta mengambil keputusan. Dapat juga peserta dibagi dalam beberapa grup, kemudian disediakan keterangan-keterangan, dan grup-grup tersebut harus mengambil keputusan sebelum permainan selesai, lalu diadakan presentasi dari masing-masing grup.

2. *In Basket Exercis* atau *in Tray Exercis*

Yaitu para peserta dilatih ketrampilannya dalam memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak ketika dihadapkan didalam suatu masalah. Kemudian peserta dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat.

3. *Role Playing*

Suatu model simulasi yang digunakan dalam *human relation training* gunanya adalah untuk pengembangan keahlian *human relation*.

4. Evaluasi pertrainingan

Evaluasi pertrainingan merupakan tahapan didalam suatu perkaderan yang memfokuskan pada pemantauan hasil-hasil dari suatu perkaderan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun beberapa tahapan didalam melakukan evaluasi terhadap pertrainingan adalah sebagai berikut:

a. Keefektifan Pelaksanaan Pertrainingan

Evaluasi jenis ini adalah evaluasi yang termasuk kategori tahap pertama dan hanya untuk mengukur bagaimana reaksi peserta terhadap perkaderan, kemampuan instruktur, kepanitiaan, dan penilaian peserta keseluruhan. Cara yang biasa digunakan adalah meminta para peserta untuk mengisi quisioner yang berisi beberapa pertanyaan tentang reaksi dan kesan mereka atas penyelenggaraan perkaderan tersebut. Pertanyaan biasanya berkisar pada topik-topik yang telah dibahas apakah relevan atau tidak, bagaimana kemampuan pengajara dalam melakukan tugasnya, dan aspek-aspek kepanitiaan.

b. Penyerapan/Retensi Materi

Kegunaan evaluasi pada tahapan ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

Pengukuran biasanya dilaksanakan dalam bentuk tes pasca perkaderan yang dilakukan menjelang hari-hari terakhir dari perkaderan.

c. Dampak Perkaderan pada Perilaku Kerja

Manfaat dilakukannya evaluasi pada tahap ini adalah untuk mengukur tingkat perubahan perilaku kerja yang terjadi setelah mereka mengikuti perkaderan. Apakah perilaku kerja telah berubah seperti yang diharapkan dan seberapa besar derajat perubahan tersebut. evaluasi pada tahap ini harus dilakukan oleh atasan langsung dari kader yang telah mengikuti perkaderan dengan mencatat perubahan-perubahan tersebut. evaluasi juga bisa dilaksanakan dengan meminta dari pelanggan yang dilayani oleh karyawan tersebut atau oleh “pelanggan internal”, yaitu karyawan atau pejabat lain dalam perusahaan yang juga dilayani oleh karyawan tersebut.²¹

E. Defenisi Konseptional

Defenisi konseptional adalah suatu usaha untuk menjelaskan tentang pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam melakukan penerapan teori pada skripsi ini.

Adapun defenisi konseptional yang digunakan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²¹ Dr. H. Achmad S. Ruky, *Sumber Daya Manusia Berkualitas: Mengubah Visi Menjadi Realitas*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal 248-249.

1. Parpol adalah adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh warga negara secara sukarela yang mempunyai tujuan, cita-cita dan orientasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya
2. Rekrutmen politik merupakan proses seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
3. Kaderisasi adalah kemampuan sebuah partai untuk melakukan ‘pengemblengan’ atau pematangan terhadap SDM-nya (kader).
4. Sistem perkaderan adalah suatu pola yang teratur dan terencana serta kontinyu dalam perkaderan.

F. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah rician indikator yang berguna sebagai panduan dalam mengumpulkan data dilapangan. Dalam penelitian tentang sistem pengkaderan Partai Golkar, indikatornya adalah:

1. Sistem Pengkaderan yang meliputi:
 - a. Bentuk Perkaderan;
 - b. Tujuan Perkaderan;
2. Materi Pokok Perkaderan:
 - a. Materi Ideologi, Kenegaraan dan Kebangsaan
 - b. Materi Ke-Golkaran
 - c. Materi Keorganisasian, Kepemimpinan dan Keahlian

- d. Materi Masalah Organisasi dan Muatan Lokal
- 3. Metode Perkaderan Meliputi:
 - a. Ceramah
 - b. Diskusi
 - c. Mentaplan
 - d. Studi Kasus
- 4. Evaluasi dan Follow Up Perkaderan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh melalui keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan berpengaruh terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini serta pihak-pihak terkait didalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang berkompeten ini adalah pihak atau individu yang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi didalam DPD Partai Golkar D.I.Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai catatan, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, koran, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan bersumber pada arsip-arsip resmi yang berhubungan dengan pengkaderan Partai Golkar itu sendiri. Dalam menguji keabsahan data, dapat digunakan tehnik triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Atau lebih jelasnya tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan dalam pemeriksaan melalui sumber lain. Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dengan dokumen yang berkaitan.

b. Wawancara

Tehnik wawancara (interview) adalah cara penumpulan data melalui kontak langsung anatar penumpul data dengan sumber data yang dikenal dengan sebutan reponden.²² Merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara mewawancarai secara langsung para

²² Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989, hal 110.

responden yang mempunyai kewenangan sehubungan dengan pengkaderan didalam Partai Golkar.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data tehnik yang digunakan adalah tehnik kualitatif, yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data statistik data matematis, dengan menggunakan analisa ini agar mendapat jawaban yang ilmiah, logis, dan empiris. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data terkumpul tanpa penghitungan statistik.²³

²³ Noeng Muhajdir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989,hal 71.